

Regulasi/Peraturan dan Kebijakan Penanaman Modal

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian.**
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pertambangan.**
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.**
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.**
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.**
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**
- 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.**
- 10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perikanan.**
- 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.**
- 12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**
- 13. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.**
- 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.**

- 15. Pengaturan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal.**
- 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Per.05/Men/2008 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan tangkap.**
- 17. Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ot.140/007 tahun 2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan.**
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.**
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.**
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.**
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.**
- 22. Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo Nomor 70/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.**
- 23. Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala BKPM No. 57/SK/2004 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka PMDN dan PMA.**